

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

SKRIPSI

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA PRABUMULIH**



DISUSUN OLEH :

**HUMAIRAH
01033130008**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

352.15707
Hum
a
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI



SKRIPSI

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA PRABUMULIH**

R.15746
15508



DISUSUN OLEH :

HUMAIRAH
01033130008

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Humairah
NIM : 01033130008
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Panitia Pembimbing Skripsi

Tanggal 24 Februari 2007 Ketua Panitia



Drs. Burhanuddin, MAcc., Ak

Tanggal 23 Februari 2007 Anggota Panitia



Ahmad Subeki, SE, Ak

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(QS. Alam Nasyrah; 6-8)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu yang tercinta

Saudara dan saudariku yang tersayang

Orang-orang disekelilingku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa

Diriku sendiri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, penguasa jagad raya yang telah memberikan begitu banyak limpahan kasih sayang, rahmat, karunia, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar, serta Shalawat dan salam hanya kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya yang suci.

Penulis sebagai manusia yang lemah dan memiliki begitu banyak kekurangan berusaha untuk mencurahkan segala kemampuan dan perhatiannya untuk kesempurnaan skripsi ini, namun dalam tahap penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan-bantuan yang berupa bimbingan-bimbingan secara langsung dari dosen pembimbing, saran dan petunjuk serta keterangan-keterangan baik secara lisan maupun tulisan. Untuk itulah dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Syamsurijal AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bapak H. Aspahani, SE, MM, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi.
3. Bapak Drs. Burhannuddin, MAcc, Ak, selaku Ketua Pembimbing Skripsi atas bimbingan dan pengarahan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Subeki, SE, Ak, selaku Anggota Pembimbing Skripsi atas bimbingannya.
5. Bapak H. Drs. Tanzil Djunaidi, Ak, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen-dosen di Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Ketua bagian Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih beserta staf dan karyawan yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis untuk memberikan data yang penulis butuhkan (terutama Kak Muslimin dan Kak Ucup makasih banyak y sdh ngasih data n ngasih saran-saran untuk skripsi ini).
8. Teman-teman aq yang selama 3,5 tahun di layo yang ado di seluruh jurusan baik akuntansi, manajemen n EP jangan lupoi aq y kalo sudah pisah (terutama Dian, Ivonne, Jenny, Epan yang selalu makan be gawenyo), thanx for your support n keep in touch.
9. Kak Anas makasih banyak sudah ngebenerin computer aq, sorry sudah ngebuat u hilir mudik cuma untuk ngebenerin computer aq.
10. Alya makasih y sudah ngerewai tante ngetik skripsi, Walaupun ngerewai dengan tangisan Alya be he... he...

Palembang, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metodologi Penelitian	4
1.5.1. Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.5.2. Sumber Data	5
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	6
1.5.4. Teknik Analisis Data	6
1.6. Sistematika Pembahasan	10



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Analisis Rasio Keuangan	12
2.1.1. Definisi Analisis dan Rasio Keuangan	12
2.1.2. Analisis Rasio Keuangan pada Perusahaan Swasta	12
2.1.3. Analisis Rasio Keuangan pada APBD	14
2.2. Konsep Anggaran Sektor Publik	19
2.2.1. Definisi Anggaran dan Penganggaran	19
2.2.2. Anggaran Sektor Publik	20
2.2.3. Fungsi Anggaran Sektor Publik	21
2.2.4. Pentingnya Anggaran Sektor Publik	24
2.2.5. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	24
2.2.6. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik	25
2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah	26
2.3.1. Pengertian Keuangan Daerah.....	26
2.3.2. Penyusunan APBD	27
2.3.3. Proses Penetapan APBD	29
2.3.4. Struktur APBD	31
2.3.5. Klasifikasi Pendapatan Dalam APBD	35
2.3.6. Klasifikasi Belanja Dalam APBD	39
2.3.7. Klasifikasi Pembiayaan Dalam APBD	47
2.3.8. Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	49

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PRABUMULIH

3.1. Profil Kota	53
3.1.1. Sejarah Kota Prabumulih	53
3.1.2. Peta Wilayah	57
3.1.3. Letak dan Batas	58
3.1.4. Kependudukan	58
3.2. Pemerintahan	60
3.2.1. Dasar Pembentukan Aparat Pemerintah Kota Prabumulih..	60
3.2.2. Visi dan Misi	61
3.2.2.1. Visi	61
3.2.2.2. Misi	61
3.2.3. Struktur Organisasi	61
3.3. Infrastruktur	71
3.3.1. Pendidikan	71
3.3.2. Kesehatan	71
3.3.3. Transportasi	72
3.3.4. Telekomunikasi	73
3.3.5. Listrik dan Air Bersih	74
3.3.6. Jalan dan Jembatan	74
3.4. Potensi	75
3.4.1. Pertanian	75
3.4.2. Perikanan	76

3.4.3. Peternakan	76
3.4.4. Perkebunan	76
3.4.5. Pertambangan.....	77
3.5. Informasi	77
3.5.1. Perekonomian	77
3.5.2. Perbankan	78
3.5.3. PAD dan PBB	78
3.4. Kondisi Keuangan (APBD) Pemerintah Kota Prabumulih	81

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kota Prabumulih...	86
4.1.a. Analisis Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kota Prabumulih Perbandingan Target dan Realisasi	87
4.1.b. Analisis Rasio Kemandirian Keungan Daerah Kota Prabumulih Per Periode	92
4.2. Analisis Rasio Efektifitas Kota Prabumulih	98
4.3. Analisis Rasio Efisiensi Kota Prabumulih	101
4.3.a. Analisis Rasio Efisiensi Kota Prabumulih Perbandingan Target Dengan Realisasi	102
4.3.b. Analisis Rasio Efisiensi Kota Prabumulih Per Periode...	104
4.4. Analisis Rasio Keserasian Kota Prabumulih	106
4.4.1. Analisis Rasio Belanja Rutin Kota Prabumulih	107

4.4.1.a.	Analisis Rasio Belanja Rutin Kota Prabumulih Perbandingan Target dan Realisasi	107
4.4.1.b.	Analisis Rasio Belanja Rutin Kota Prabumulih Per Periode	111
4.4.2.	Analisis Rasio Belanja Pembangunan Kota Prabumulih..	113
4.4.2.a.	Analisis Rasio Belanja Pembangunan Kota Prabumulih Perbandingan Target dan Realisasi	113
4.4.2.b.	Analisis Rasio Belanja Pembangunan Kota Prabumulih Per Periode	116
4.5.	Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kota Prabumulih	118
4.5.a.	Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kota Prabumulih Perbandingan Target Dengan Realisasi	120
4.5.b.	Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kota Prabumulih Per Periode	122
4.6.	Analisis Rasio Pertumbuhan Kota Prabumulih	124
4.6.a.	Analisis Rasio Pertumbuhan Kota Prabumulih Perbandingan Target Dengan Realisasi	124
4.6.b.	Analisis Rasio Pertumbuhan Kota Prabumulih Per Periode	127

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 132

5.2. Saran 134

DAFTAR PUSTAKA 135

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perkiraan Struktur APBD Berdasarkan PP No. 24/2005	33
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Prabumulih	59
Tabel 3.2. Jumlah Guru, Murid dan Murid Lulus di Kota Prabumulih sampai dengan Tahun 2005	71
Tabel 3.3. Jumlah Gedung Sekolah di Kota Prabumulih Tahun 2005	71
Tabel 3.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2005	72
Tabel 3.5. Jumlah Tenaga Kesehatan sampai Tahun 2005	72
Tabel 3.6. Jumlah Pendapatan dan Pendapatan Per Bulan dari Stasiun Kereta Api Kota Prabumulih Tahun 2005	73
Tabel 3.7. Fasilitas Telekomunikasi Kota Prabumulih Tahun 2005	74
Tabel 3.8. Jumlah Jembatan dan Panjang di Kota Prabumulih	75
Tabel 3.9. Jumlah Jalan dan Panjang di Kota Prabumulih	75
Tabel 3.10. Luas Areal, Produksi dan Potensi Pengembangan Perikanan	76
Tabel 3.11. Potensi Pertambangan Kota Prabumulih Tahun 2005	77
Tabel 3.12. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 dan Tahun 2005	78
Tabel 3.13. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Prabumulih Tahun 2004 dan Tahun 2005	79

Tabel 3.14. Jumlah Perusahaan yang Membuat TDP Tahun 2004/2005	79
Tabel 3.15. Ringkasan APBD Pemerintah Kota Prabumulih T.A. 2002	82
Tabel 3.16. Ringkasan APBD Pemerintah Kota Prabumulih T.A. 2003	83
Tabel 3.17. Ringkasan APBD Pemerintah Kota Prabumulih T.A. 2004	84
Tabel 3.18. Ringkasan APBD Pemerintah Kota Prabumulih T.A. 2005	85
Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih.....	87
Tabel 4.2. Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	87
Tabel 4.3. Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	92
Tabel 4.4. Target Pendapatan dan Realisasi PAD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	99
Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Efektifitas Kota Prabumulih T.A. 2002-2005	99
Tabel 4.6. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	102
Tabel 4.7. Perhitungan Rasio Efisiensi Kota Prabumulih T.A. 2002-2005	102
Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Efisiensi Kota Prabumulih T.A. 2002-2005	104
Tabel 4.9. Belanja Rutin, Belanja Pembangunan dan Total APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	107
Tabel 4.10. Perhitungan Rasio Belanja Rutin Kota Prabumulih T.A. 2002-2005..	108
Tabel 4.11. Perhitungan Rasio Belanja Rutin Kota Prabumulih T.A. 2002-2005..	111

Tabel 4.12. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	113
Tabel 4.13. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	116
Tabel 4.14. PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK, Belanja Rutin, Pinjaman Serta Angsuran Pinjaman, Utang dan Bunga Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	120
Tabel 4.15. Perhitungan Debt Service Coverage Ratio Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	121
Tabel 4.16. Perhitungan Debt Service Coverage Ratio Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	122
Tabel 4.17. PAD, Total Pendapatan, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005	124
Tabel 4.18. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Prabumulih T.A. 2002-2005...	125
Tabel 4.19. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Prabumulih T.A. 2002-2005...	127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Prabumulih	63
Gambar 3.2. Perekonomian Kota Prabumulih	77
Gambar 3.3. Jumlah Perusahaan Yang Telah Mempunyai SIUP Berdasarkan Jenis Tahun 2004/2005	80
Gambar 3.4 Jumlah Perusahaan Yang Telah Mempunyai SIUP Per Kecamatan Tahun 2004/2005	80


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB I


Nama : Humairah
NIM : 01033130008
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Panitia Pembimbing Skripsi

Tanggal 15 Januari 2007 Ketua Panitia


Drs. Burhanuddin, MAcc., Ak

Tanggal 11 Januari 2007 Anggota Panitia


Ahmad Subeki, SE, Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melewati berkali-kali perubahan di semua segi kehidupan baik berbangsa maupun bernegara. Perubahan itu meliputi perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perubahan itu juga mengakibatkan adanya pergantian kepemimpinan sehingga membawa dampak adanya perubahan kewenangan baik kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintah daerah. Di dalam kewenangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Pemerintah Kabupaten maupun propinsi. Hal ini disahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan

lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan

daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kemampuan daerah tersebut sehingga penulis mengambil judul **“ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.”**

1.2. Perumusan masalah

Kota Prabumulih sebagai salah satu daerah yang mengalami pemekaran perlu untuk melakukan analisis rasio keuangan daerah mengingat keterbatasan pendapatan asli daerah tersebut dalam mengimbangi perolehan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka yang menjadi masalah yang ingin penulis jawab yaitu mengenai :

1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Prabumulih?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Prabumulih?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Prabumulih.
2. Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan perbedaan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Prabumulih.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah Kota Prabumulih dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah Kota Prabumulih.
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah Kota Prabumulih dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
6. Membandingkan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2005.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan sehingga tidak menyimpang dari masalah-masalah yang dihadapi, maka penulis membatasi ruang lingkup pada masalah-masalah yang berhubungan dengan judul skripsi.

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis kemampuan daerah yang meliputi analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, ratio pertumbuhan, dan rasio kemampuan daerah Pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2002-2005.

1.5.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data mengenai sejarah singkat, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi Kota Prabumulih, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain. Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang dalam hal ini berupa laporan keuangan (APBD) Kota Prabumulih tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 yang dapat diperoleh dari :

1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih
3. Biro Pusat Statistik Kota Prabumulih
4. Instansi – instansi yang terkait lainnya

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Data di atas dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

1. Studi lapangan

a. Wawancara

Data yang dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen baik yang terjadi di masa lampau atau di masa sekarang.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) cara yaitu :

a. Analisis Kuantitatif

Yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005

Analisis kemampuan daerah ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio yang berupa :

1. *Analisis rasio kemandirian keuangan daerah*

Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. *Analisis rasio efektifitas*

Analisis ini dilakukan untuk membanding realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pada periode yang telah ditentukan. Analisis ini berguna untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}} \times 100 \%$$

3. *Analisis rasio efesiensi*

Analisis ini diperoleh dengan membandingkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.

pendapatan asli daerah itu sendiri.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Apabila biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah (PAD) tidak tercantum dalam APBD maka biaya tersebut ditetapkan sebesar 5% per bulannya dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times (5\% \times 12 \text{ bulan})}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

4. Analisis rasio keserasian

Rasio belanja rutin diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

Sedangkan rasio belanja pembangunan diperoleh dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

5. Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi :

a. Ketentuan yang menyangkut prasyarat :

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

a. Ketentuan yang menyangkut prosedur

6. Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

2. Analisis Kualitatif

Yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh dari objek penelitian serta membandingkannya dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku umum. Jadi analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis angka-angka hasil perhitungan diatas dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam analisis kuantitatif.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian tersebut, perumasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta teknik analisis yang digunakan dalam menghitung dan mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Prabumulih.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai konsep dasar analisis rasio, anggaran sektor publik (APBD), proses penyusunan dan penetapannya,

struktur APBD, komponen – komponen yang terdapat di dalam APBD serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kondisi geografis Kota Prabumulih, struktur organisasi dan pemerintahan serta keadaan perekonomian Kota Prabumulih.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibicarakan mengenai analisis dan pembahasan mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Prabumulih.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikekmukakan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih dan apa saran yang diberikan oleh penulis sebagai upaya dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kota Prabumulih dalam hal kinerja pengelolaan keuangan daerah.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB II

Nama : Humairah

NIM : 01033130008


Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

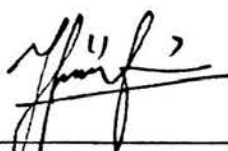
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Panitia Pembimbing Skripsi

Tanggal 29 Januari 2007 Ketua Panitia


Drs. Burhanuddin, MAcc., Ak

Tanggal 25 Januari 2007 Anggota Panitia


Ahmad Subeki, SE, Ak

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002*, Pemerintah Kota Prabumulih, 2002.

-----, *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003*, Pemerintah Kota Prabumulih, 2003.

-----, *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004*, Pemerintah Kota Prabumulih, 2004.

-----, *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005*, Pemerintah Kota Prabumulih, 2005.

-----, *Kota Prabumulih* [online]. Tersedia : www.kotaprabumulih.go.id. [2006]

Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 2006.

Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Haryadi, Rahmat Tri. *Analisa Rasio Keuangan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Media Akuntansi Edisi 45 Mei 2005, hal 51-53.

Imawardi. *Cara Mudah Mempelajari Manajemen Keuangan*, Penerbit Elex Media Komputindo, 2006.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.

Republik Indonesia, Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 *Tentang Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*, 2002

----- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005.*

----- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah, 2004.*

----- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004.*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001, *Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.*